

**ANALISIS KINERJA KEUANGAN,
KEMAMPUAN KEUANGAN DAN EVALUASI APBD DALAM PELAKSANAAN
OTONOMI DAERAH DI
KOTA SORONG PROVINSI PAPUA BARAT DAYA**

Otscard Juan Felix Safkaur
NPP 30.1556

*Asdaf Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya
Program Studi Keuangan Publik
E-mail : Otscard@gmail.com*

Pembimbing Skripsi : Dr. Drs. Eko Subowo, MBA

ABSTRACT

Problems statement/Background (GAP): the author focuses on the problem of the poor financial performance of the local government of the city of Sorong in implementing regional autonomy as a new provincial capital. **Purpose:** The aim of this research is to measure the performance and financial capacity of the local government of the city of Sorong. **Method:** This research is a qualitative-research with a quantitative descriptive approach and uses the financial performance analysis method according to Mahmudi. Data collection techniques were carried out by in-depth interviews (5 informants), and documentation. **Results/Findings:** The findings obtained by the author in this study, namely the Independence Ratio and the Degree of Decentralization Ratio are still in the Less category, the Activity Ratio in 2019 was in the Very Effective category but entering 2020-2022 it is always in the Ineffective category. For the Expenditure Activity Ratio, local governments still allocate more funds to apparatus expenditures than capital expenditures, while for the Expenditure Harmonization Ratio, local governments prioritize Direct Expenditure over Indirect Expenditures. The Financial Capability of Sorong City can still be categorized as High. However, this high figure is more dominated by the amount of transfer revenue from the Central Government. the average income variance for Sorong City is in the Unfavorable category. The majority of shopping variances are in the favorable category. **Conclusion:** the financial performance of the local government of the city of Sorong is still relatively poor and less effective. Financial capability is classified as poor because they still rely on funds from the central government.

Keywords: Financial Performance, Financial Capability, APBD Evaluation, Analysis, Regional Autonomy

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): penulis berfokus pada permasalahan buruknya kinerja keuangan pemerintah daerah kota sorong dalam melaksanakan otonomi daerah sebagai sebuah ibukota provinsi yang baru. **Tujuan:** Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengukur kinerja dan kemampuan keuangan pemerintah daerah kota sorong. **Metode:** Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif kuantitatif serta menggunakan metode analisis Kinerja keuangan menurut Mahmudi. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan Wawancara mendalam (5 Informan), dan Dokumentasi. **Hasil/Temuan:** Temuan yang diperoleh Penulis dalam penelitian

ini yaitu Rasio Kemandirian dan Rasio Derajat Desentralisasi masih berada di kategori Kurang, Rasio Aktivitas pada tahun 2019 sempat berada di kategori Sangat Efektif namun memasuki tahun 2020-2022 selalu berada pada kategori Tidak Efektif. Untuk Rasio Aktivitas Belanja, pemerintah daerah masih lebih banyak mengalokasikan dana kepada belanja aparatur daripada belanja modal, sedangkan untuk Rasio Keserasian Belanja, pemerintah daerah lebih mengutamakan Belanja Langsung daripada Belanja Tidak Langsung. Kemampuan Keuangan Kota Sorong masih dapat dikategorikan Tinggi. Namun, tingginya angka tersebut lebih didominasi oleh jumlah pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat. varians pendapatan Kota Sorong rata-rata berada di golongan *Unfavorable* (tidak disukai). varians Belanja mayoritas berada pada kategori *favorable* (disukai). **Kesimpulan:** kinerja keuangan pemerintah daerah kota sorong masih tergolong buruk dan kurang efektif. Kemampuan keuangan tergolong buruk karena masih mengandalkan dana dari pemerintah pusat.

Kata Kunci: Kinerja Keuangan, Kemampuan Keuangan, Evaluasi APBD, Analisis, Otonomi Daerah

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah memegang peranan utama dan kewenangan yang sangat penting dalam melaksanakan pembangunan dan pelayanan masyarakat. kewenangan pemerintah tersebut haruslah digunakan untuk kepentingan bersama dalam rangka menjamin perkembangan dan pembangunan nasional. Kewenangan pemerintah harus dimaksimalkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Soares, Nurpratiwi and Makmur, 2015). Undang-Undang no. 23 Tahun 2014 menyatakan bahwa Otonomi daerah yang telah diberikan pemerintah pusat kepada daerah bertujuan untuk memberikan daerah kesempatan untuk membangun daerahnya sendiri secara mandiri terlepas dari pengaruh pemerintah pusat. Selain itu, pusat juga mengharapkan daerah agar dapat membangun wilayahnya dengan sumber daya daerahnya masing-masing agar tidak terlalu membebani pemerintah pusat.

Diberikannya otonomi daerah kepada setiap daerah diharapkan dapat mendorong daerah agar dapat mandiri secara administratif dan dapat melindungi ekosistem perekonomiannya masing-masing. Untuk itu, pemerintah daerah harus bisa menjaga kemandirian daerahnya dan mampu untuk bertumbuh sendiri sebisa mungkin terlepas dari campur tangan pemerintah pusat.

Melalui pemberian kewenangan untuk mengatur daerahnya masing-masing, pemerintah daerah harus mampu mengatur keuangannya dengan sebaik mungkin dengan memperhatikan prinsip efisiensi dan efektifitas dalam penggunaan anggaran. Pemerintah daerah harus menerapkan prinsip tersebut dengan sebaik-baiknya agar dapat memberikan pengaruh yang signifikan terhadap pembangunan dan pelayanan serta dapat menghemat anggaran sebaik mungkin.

Pemerintah daerah juga harus mengawasi dan memperhatikan penggunaan anggaran agar terserap semaksimal mungkin. Semakin terserapnya alokasi anggaran, maka semakin maksimalnya pembangunan dan perkembangan daerah yang terealisasi. Menurut Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 yang mengatur tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan “Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang dalam hal penyelenggaraan pemerintahan daerah, serta segala jenis kekayaan yang dapat dijadikan milik daerah dalam hal hak dan kewajiban daerah”.

Selain unsur-unsur seperti kesiapan sumber daya manusia, kelembagaan, proses, prosedur, serta sarana dan prasarana pendukung, Mewujudkan otonomi yang luas, sejati, dan bertanggung jawab sebagaimana diatur dalam UU No. 23 Tahun 2014 sebagian besar bergantung pada kekayaan daerah. Rendahnya kontribusi PAD terhadap APBD secara umum disebabkan oleh kurangnya kemampuan pemerintah kabupaten/kota dalam menggali keuangan daerah dari potensi yang ada, dugaan ini juga berlaku untuk daerah yang memiliki potensi pertumbuhan ekonomi yang kuat berbasis barang dan jasa serta posisi yang strategis, seperti Kota Sorong.

Ditetapkannya Kota Sorong sebagai ibukota provinsi baru Papua Barat Daya, tentu saja harus disambut pemerintah daerah dengan segala persiapan yang maksimal. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus memiliki kinerja keuangan yang efektif dan efisien dalam rangka pembangunan daerah yang lebih baik. Kemudian, Kemampuan keuangan daerah sangat diperlukan dalam rangka persiapan daerah ini menjadi ibukota provinsi dimana sebuah ibukota provinsi dituntut untuk mampu menopang sendiri aktivitas pemerintahan dan keuangan daerahnya demi pemenuhan kewajiban pelayanan publik kepada masyarakat serta pelaksanaan otonomi daerah.

1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Otonomi daerah yang diberikan oleh pemerintah pusat diharapkan dapat membuat daerah mampu mandiri secara keuangan dalam pembiayaan pembangunan dan operasionalisasi pemerintahan daerah. Daerah diharapkan dapat membiayai sendiri segala keperluan dan urusan pemerintahan masing-masing dengan potensi yang dimiliki. Untuk itu, pemerintah daerah perlu mengeksplor setiap sumber daya serta potensi yang tersedia untuk menjamin pembangunan daerahnya.

Melalui pemberian kewenangan untuk mengatur daerahnya masing-masing, pemerintah daerah harus mampu mengatur keuangannya dengan sebaik mungkin dengan memperhatikan prinsip efisiensi dan efektifitas dalam penggunaan anggaran. Pemerintah daerah harus menerapkan prinsip tersebut dengan sebaik-baiknya agar dapat memberikan pengaruh yang signifikan terhadap pembangunan dan pelayanan serta dapat menghemat anggaran sebaik mungkin.

Pemerintah daerah juga harus mengawasi dan memperhatikan penggunaan anggaran agar terserap semaksimal mungkin. Semakin terserapnya alokasi anggaran, maka semakin maksimalnya pembangunan dan perkembangan daerah yang terealisasi. Menurut Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 yang mengatur tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan “Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang dalam hal penyelenggaraan pemerintahan daerah, serta segala jenis kekayaan yang dapat dijadikan milik daerah dalam hal hak dan kewajiban daerah”.

Kemampuan pemerintah daerah untuk melakukan pembangunan di daerahnya merupakan faktor fundamental yang perlu diperhitungkan, kurangnya kemampuan keuangan daerah dapat disebabkan oleh ketidakmampuan pemerintah daerah untuk mengenali dan memanfaatkan sumber-sumber pendapatan yang berpotensi dan akan menghambat keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah. Secara umum, semakin rendah ketergantungan keuangan pemda kepada pusat, semakin banyak Pendapatan Asli Daerah yang harus disumbangkan ke dalam APBD.

1.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu. Penelitian Liswan, Andi dan Vita di kota Palu menemukan bahwa Laju pertumbuhan dan kontribusi tertinggi terhadap Pendapatan Asli Daerah terjadi pada PAD Sah Lainnya serta Kemampuan keuangan daerah Pemerintah Kota Palu

telah dikategorikan “Kurang”(Rusman, Amir and Fattah, 2018). Penelitian Arthaingan menemukan bahwa Pengelolaan Kota Bogor secara umum telah berjalan dengan baik berdasarkan rasio keuangan dan efektivitas keuangan daerah Kota Bogor cukup baik atau efektif, melebihi target yang telah ditetapkan(Mutiha, 2017). Penelitian Heri menemukan bahwa pemerintah daerah Kabupaten Tapanuli Tengah secara umum memiliki kinerja keuangan yang baik, meskipun tingkat desentralisasinya masih rendah, ketergantungan pada pemerintah pusat dan provinsi masih sangat tinggi serta PAD kurang dari target yang dianggarkan(Harahap, 2020). Penelitian Naveed dan Syahid menemukan bahwa Korupsi menghambat kinerja sektor keuangan setelah mengendalikan PDB per kapita dan keterbukaan perdagangan. Selain itu, Terdapat pengaruh positif dan signifikan kredit tahun lalu terhadap kredit tahun berjalan serta Korupsi merusak kemandirian sektor keuangan maju(Ahmad and Ali, 2010). Penelitian Geraldine, Gerald dan Stephen menemukan bahwa Beberapa dewan yang dianggap berkinerja 'baik' di media muncul sebagai dewan dengan kinerja terbaik secara keseluruhan. Selain itu, Hasilnya menyediakan platform untuk debat dan diskusi dengan manajemen otoritas lokal dan pejabat departemen pemerintah untuk lebih mendefinisikan unsur-unsur kinerja keuangan yang paling penting(Robbins, Turley and McNena, 2016).

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang cukup berbeda dengan penelitian terdahulu. Lokus penelitian dan metode yang digunakan berbeda dengan penelitian Akmalia, Tanjung, Harahap, Mutiha dkk. Selain itu, pengukuran/indicator yang digunakan juga berbeda dari penelitian sebelumnya yakni menggunakan pendapat dari Mahmudi (Mahmudi, 2019).

1.5 Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mengukur kinerja dan kemampuan keuangan pemerintah daerah kota sorong dalam melaksanakan otonomi daerah.

II. METODE

Jenis penelitian ini adalah penelitian Kualitatif. pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan Deskriptif Kuantitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu Wawancara dan Dokumentasi. Dalam melakukan pengumpulan data Kualitatif, penulis melakukan wawancara secara mendalam terhadap 5 orang informan yang terdiri dari Sekretaris BPKAD Kota Sorong, Sekretaris Dispenda, Kepala Bidang Anggaran, Kepala Bidang Kasda dan Perbendaharaan serta Kepala Subbidang Penerimaan. Adapun pengumpulan data sekunder yaitu dengan Dokumentasi yakni dengan mengambil data berupa Laporan Realisasi Anggaran Kota Sorong dari tahun 2019-2022. Salah satu strategi analisis data yang sering digunakan dalam penelitian kualitatif adalah model analisis data aliran yang dibuat oleh Miles dan Huberman. Dalam teknik analisis data ini terbagi menjadi tiga kegiatan yaitu Reduksi data (Data Reduction), Tampilan data (Display Data) serta Menarik kesimpulan dan verifikasi (Conclusion And Verification). Metode analisis data yang digunakan yaitu Analisis Rasio yang dikemukakan Mahmudi yang terdiri atas Rasio Kemandirian, Rasio Aktivitas, Rasio Derajat Desentralisasi, Rasio Efektivitas PAD dan Rasio Kecerahan Belanja(Mahmudi, 2019). Selanjutnya untuk mengukur kemampuan keuangan pemerintah daerah Kota Sorong, peneliti menggunakan Indeks Kemampuan Keuangan yang dikemukakan oleh Bisma & Susanto(Bisma and Susanto, 2010).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis menganalisis kinerja keuangan, kemampuan keuangan dan mengevaluasi APBD secara umum melalui Varians (Selisih) pendapatan dan belanja. Adapun pembahasan dapat dilihat pada subbab berikut :

3.1 Deskriptif Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif. Data penelitian yang digunakan berupa data sekunder yang diperoleh dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Sorong. Data penelitian ini berupa laporan keuangan pemerintah daerah Kota Sorong selama 4(empat) tahun yaitu dari tahun 2019-2022. Gambaran umum APBD Kota Sorong yang dikelola oleh BPKAD Kota Sorong selama tahun 2019-2022 disajikan pada tabel di bawah ini :

Tabel 1.
APBD Pemerintah Kota Sorong Tahun 2019-2022

No	Komponen	Tahun			
		2019	2020	2021	2022
1	Pendapatan Daerah	1,173,312,526,764	1,108,836,093,209	980,842,420,928	1,036,120,272,012
2	- PAD	188,001,695,883	120,728,889,367	167,676,958,723	64,699,242,782
3	- Pendapatan Transfer	960,037,536,979	967,507,303,637	792,705,390,293	971,421,029,230
4	- Lain-Lain Pendapatan yang Sah	25.273.293.902	20.599.900.204	20.460.071.911	-
5	Belanja Daerah	1,120,992,577,690	1,151,643,979,132	943,456,840,284	817,764,578,663
6	- Belanja Operasi	819,943,379,218	832,366,604,716	727,232,103,817	609,570,944,880
7	- Belanja Modal	300,830,212,471,58	317,127,374,415	216,120,524,059	208,193,633,783
8	- Belanja Tak Terduga	218,986,000	2,150,000,000	104,202,408	0
9	Belanja Langsung	1,082,173,790,560	1,096,779,981,651	895,910,872,060	768,515,523,714
10	Belanja Tidak Langsung	387,230,387,481	399,624,590,266	382,049,721,768	347,258,662,973

Sumber : BPKAD Kota Sorong, Tahun 2023

3.2 Analisis Kinerja Keuangan

1. Rasio Kemandirian

$$\text{Rasio Kemandirian Daerah (\%)} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Transfer Pusat + Provinsi + Pinjaman}} \times 100\%$$

Tabel 2.
Rasio Kemandirian Kota Sorong Tahun 2019-2022

Tahun	PAD	Pendapatan Transfer	Rasio Kemandirian (%)	Kemampuan daerah	Tingkat Kemandirian	Pola Hubungan
2019	188,001,695,883	960,037,536,979	19.58	Rendah Sekali	Kurang	Instruktif
2020	120,728,889,367	967,507,303,637	12.47	Rendah Sekali	Kurang	Instruktif
2021	167,676,958,723	792,705,390,293	21.15	Rendah Sekali	Kurang	Instruktif
2022	64,699,242,782	971,421,029,230	6.66	Rendah Sekali	Kurang	Instruktif
Mean			14.96			

Sumber : Diolah Penulis, Tahun 2023

Berdasarkan perhitungan tersebut, Tingkat kemandirian keuangan Kota Sorong dinilai cukup buruk dengan rata-rata hanya mencapai 14,96%. Dari hasil pengukuran tersebut, pada tahun 2019 rasio kemandiriannya menunjukkan angka 19,58%, tahun 2020 hasilnya turun ke 12,47%, tahun 2021 kembali mengalami peningkatan ke 21,15% dan menunjukkan hasil paling kecil pada tahun 2022 sebesar 6,66%. Tingkat kemandirian keuangan pemerintah daerah Kota Sorong ditinjau dari Rasio Kemandirian selama rentang waktu tersebut masih tergolong kategori Kurang dan kemampuan keuangan daerah Kota Sorong sendiri berada di kategori Rendah Sekali. Pola hubungan keuangan dengan pemerintah pusat yang dihasilkan yaitu pola hubungan Instruktif. Berdasarkan pola hubungan Instruktif, peran pemerintah pusat atau transfer dari luar daerah lebih dominan dari pada kemampuan Pendapatan Asli Daerah. Mahmudi menyatakan “semakin tinggi angka rasio ini menunjukkan pemerintah daerah semakin tinggi kemandirian keuangannya”, berdasarkan pernyataan tersebut maka Kota Sorong masih belum mencapai kemandirian secara finansial.

2. Rasio Derajat Desentralisasi

$$\text{Rasio Derajat Desentralisasi}(\%) = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Tabel 3.
Rasio Derajat Desentralisasi Kota Sorong Tahun 2019-2022

Tahun	PAD	Total Pendapatan Daerah	Rasio Derajat Desentralisasi (%)	Kriteria
2019	188,001,695,883	1,173,312,526,764	16.02	Kurang
2020	120,728,889,367	1,108,836,093,209	10.88	Kurang
2021	167,676,958,723	980,842,420,928	17.09	Kurang
2022	64,699,242,782	1,036,120,272,012	6.24	Kurang
Mean			12.56	

Sumber : Diolah Penulis, Tahun 2023

Berdasarkan hasil perhitungan tersebut, Rata-rata Rasio Derajat Desentralisasi Kota Sorong mencapai 12,56%. Bisa dilihat dari hasil pengukuran tersebut, bahwa dari tahun 2019-2022 nilai rasio derajat desentralisasi bersifat fluktuatif, tahun 2019 hasil pengukurannya menunjukkan angka 16,02%, tahun 2020 menunjukkan 10,88%, tahun 2021 sebesar 17,09% dan tahun 2022 menunjukkan angka paling rendah yaitu 6,24%. Melihat naik dan turunnya hasil pengukuran di atas juga menunjukkan bahwa selama rentang waktu tersebut Pendapatan Asli Daerah Kota Sorong cenderung tidak stabil. Rasio Derajat Desentralisasi untuk Kota Sorong sendiri selalu berada di kriteria Kurang. Mahmudi menyatakan “semakin tinggi kontribusi Pendapatan Asli Daerah maka semakin tinggi Kemampuan pemerintah dalam penyelenggaraan desentralisasi”. Berdasarkan perhitungan data tersebut, maka hal ini menunjukkan bahwa Kota Sorong sendiri belum mampu untuk menopang keuangannya sendiri dari sisi Pendapatan Asli Daerah.

3. Rasio Efektivitas PAD

$$\text{Rasio Efektifitas PAD (\%)} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Tabel 4.
Rasio Efektivitas PAD Kota Sorong Tahun 2019-2022

Tahun	Realisasi Penerimaan PAD	Target Penerimaan PAD	Rasio Efektivitas(%)	Kriteria
2019	188,001,695,883	143,789,331,800	130.74	Sangat Efektif
2020	120,728,889,367	277,548,450,470	43.49	Tidak Efektif
2021	167,676,958,723	314,251,055,993	53.35	Tidak Efektif
2022	64,699,242,782	325,392,277,421	19.88	Tidak Efektif
	Mean		61.87	

Sumber : Diolah Penulis, Tahun 2023

Berdasarkan perhitungan tersebut, Rata-rata Rasio Efektivitas pemerintah Kota Sorong mencapai 61,87%. Bisa dilihat bahwa Pendapatan Asli Daerah Kota Sorong pada tahun 2019 melampaui target yang telah ditetapkan dan berada di kriteria Sangat Efektif. Namun memasuki tahun 2020 hingga 2022 Pendapatan Asli Daerah Kota Sorong tidak mencapai target penerimaan bahkan menyentuh angka paling rendah yaitu 19,88%. Perbandingan terjauh realisasi PAD terhadap Target Realisasinya terjadi pada tahun 2019 ke tahun 2020, pada tahun 2019 menunjukkan angka 130,74% yang cukup tinggi melampaui target yang ditetapkan, akan tetapi pada tahun 2020 turun jauh ke angka 43,49%, hal tersebut menunjukkan telah terjadi penurunan sebesar 87,25%, pada tahun berikutnya hasil pengukurannya meningkat ke angka 53,35%, namun pada tahun 2022 turun ke angka paling rendah yaitu 19,88%. Hasil tersebut tentu tidak terlepas dari pengaruh pandemi covid-19 yang mulai merebak pada awal tahun 2020.

4. Rasio Aktivitas Belanja

$$\text{Rasio Belanja Aparatur (\%)} = \frac{\text{Total Belanja Operasi}}{\text{Total Belanja}} \times 100\%$$

$$\text{Rasio Belanja Publik(\%)} = \frac{\text{Total Belanja Modal}}{\text{Total Belanja}} \times 100\%$$

Tabel 5.
Rasio Belanja Operasi Kota Sorong Tahun 2019-2022

Tahun	Total Belanja Operasi	Total Belanja	Rasio Belanja
2019	819,943,379,218	1,120,992,577,690	73.14
2020	832,366,604,716	1,151,643,979,132	72.27
2021	727,232,103,817	943,456,840,284	77.08
2022	609,570,944,880	817,764,578,663	74.54
Mean			74.26

Sumber : Diolah Penulis, Tahun 2023

Perhitungan data tersebut menunjukkan bahwa hasil perhitungan rasio belanja operasi fluktuatif, tahun 2019 sebesar 73,14%, tahun 2020 menurun menjadi 72,27%, tahun 2021 naik menjadi 77,08%, dan tahun 2022 menurun menjadi 74,54%. peningkatan terbesar belanja operasi kota sorong terjadi dari tahun 2020 ke 2021 sebesar 4,81%. Belanja Operasi pemerintah Kota Sorong rata-rata berada di angka 74,26%. Hal ini dinilai kurang baik dikarenakan pemerintah Kota Sorong masih mengalokasikan belanja aparatur yang lebih besar daripada belanja publik yang dapat memberikan kontribusi langsung kepada masyarakat.

Tabel 6.
Rasio Belanja Modal Kota Sorong Tahun 2019-2022

Tahun	Total Belanja Modal	Total Belanja	Rasio Belanja
2019	300,830,212,471	1,120,992,577,690	26.83
2020	317,127,374,415	1,151,643,979,132	27.53
2021	216,120,524,059	943,456,840,284	22.90
2022	208,193,633,783	817,764,578,663	25.45
Mean			25.68

Sumber : Diolah Penulis, Tahun 2023

Hasil pengukuran Rasio belanja modal juga fluktuatif, tahun 2019 menunjukkan hasil sebesar 26,83%, tahun 2020 mengalami peningkatan menjadi 27,53%, kemudian mengalami penurunan yang paling besar pada tahun 2021 sebesar 4,63% menjadi 22,90% dan akhirnya pada tahun 2022 mengalami peningkatan ke 25,45%. Rata-rata rasio belanja publik Pemerintah Kota Sorong selama 4(empat) tahun periode anggaran tersebut sebesar 25,68%. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah Kota Sorong belum memaksimalkan anggaran untuk belanja publik, padahal belanja publik dapat bermanfaat langsung bagi masyarakat.

5. Rasio Kekeragaman Belanja

$$\text{Belanja Langsung}(\%) = \frac{\text{Total Belanja Langsung}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

$$\text{Belanja Tidak Langsung}(\%) = \frac{\text{Total Belanja Tidak Langsung}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

Tabel 7.
Rasio Belanja Langsung Kota Sorong Tahun 2019-2022

Tahun	Total Belanja Langsung	Total Belanja Daerah	Rasio Belanja
2019	1,082,173,790,560	1,120,992,577,690	96.60
2020	1,096,779,981,651	1,151,643,979,132	95.20
2021	895,910,872,060	943,456,840,284	94.96
2022	768,515,523,714	817,764,578,663	93.97
	Mean		95.20

Sumber : Diolah Penulis, Tahun 2023

Dari hasil perhitungan tersebut, Secara garis besar tidak ada perbedaan yang signifikan dari tahun 2019 sampai 2022 mengenai belanja langsung, Namun Rasio Belanja Langsung terus mengalami penurunan, Rata-rata dana yang dihabiskan pemerintah daerah untuk belanja langsung yaitu mencapai 95,20% dari total belanja daerah. Hal ini berarti bahwa Pemerintah Kota Sorong lebih banyak mengalokasikan anggaran untuk kegiatan Belanja Langsung seperti belanja operasional kantor dan belanja modal yang dapat bermanfaat langsung untuk kepentingan masyarakat.

Tabel 8.
Rasio Belanja Tidak Langsung Kota Sorong Tahun 2019-2022

Tahun	Total Belanja tidak Langsung	Total Belanja Daerah	Rasio Belanja
2019	387,230,387,481	1,120,992,577,690	34.60
2020	399,624,590,266	1,151,643,979,132	34.70
2021	382,049,721,768	943,456,840,284	40.50
2022	347,258,662,973	817,764,578,663	42.50
	Mean		38.05

Sumber : Diolah Penulis, Tahun 2023

Berdasarkan perhitungan tersebut, terjadi peningkatan yang cukup signifikan pada tahun 2020 ke 2021, pada periode ini terjadi peningkatan belanja tidak langsung sebesar 5,8%. Selama tahun 2019 hingga tahun 2022 tersebut, pemerintah Kota Sorong menghabiskan dana cukup kecil pada Belanja Tidak Langsung yaitu rata-rata sebesar 38,05% dari total belanja daerah. Hal ini dinilai cukup baik karena seharusnya anggaran dimaksimalkan kepada urusan yang berhubungan langsung dengan masyarakat.

3.3 Kemampuan Keuangan

$$Indeks X = \frac{(Nilai \times Hasil \text{ Pengukuran}) - (Nilai \text{ Kondisi Minimum})}{(Nilai \times Kondisi \text{ Maksimum}) - (Nilai \text{ Kondisi Minimum})}$$

$$IKK = \frac{X_G + X_E + X_S}{3}$$

1. Indeks Growth

Tabel 9.
Perhitungan Indeks Growth APBD Kota Sorong Tahun 2019-2022

Tahun	Realisasi PAD – Kondisi Minimal	Kondisi Maksimal – Kondisi Minimal	Indeks
2019	123,302,453,101	123,302,453,101	1,000
2020	56,029,646,585	123,302,453,101	0,454
2021	102,977,715,941	123,302,453,101	0,835
2022	0	123,302,453,101	0,000

Sumber : Diolah Penulis, Tahun 2023

Tabel 10.
Indeks Growth APBD Kota Sorong Tahun 2019-2022

Tahun	Realisasi PAD	Kondisi Minimal	Kondisi Maksimal	Indeks
2019	188.001.695.883	64.699.242.782	188.001.695.883	1,000
2020	120.728.889.367	64.699.242.782	188.001.695.883	0,454
2021	167.676.958.723	64.699.242.782	188.001.695.883	0,853
2022	64.699.242.782	64.699.242.782	188.001.695.883	0,000
Jumlah				2,307

Sumber : Diolah Penulis, Tahun 2023

$$XG = \frac{\text{Jumlah Indeks}}{n} = \frac{2,307}{4} = 0,5767$$

2. Indeks Elastisitas

Tabel 11.
Perhitungan Nilai Elastisitas APBD Kota Sorong

Tahun	PAD	Total Belanja Langsung	Nilai
2019	188,001,695,883	1,091,733,701,855	0.1722
2020	120,728,889,367	1,292,236,968,168	0.0934
2021	167,676,958,723	1,145,981,106,326	0.1463
2022	64,699,242,782	1,057,792,513,475	0.0611

Sumber : Diolah Penulis, Tahun 2023

Tabel 12.
Perhitungan Indeks Elastisitas APBD Kota Sorong Tahun 2019-2022

Tahun	Nilai – Kondisi Minimal	Kondisi Maksimal – Kondisi Minimal	Indeks
2019	0.1111	0.1111	1
2020	0.0323	0.1111	0.2907
2021	0.0852	0.1111	0.7668
2022	0	0.1111	0
Jumlah			2.0576

Sumber : Diolah Penulis, Tahun 2023

Tabel 13.
Indeks Elastisitas APBD Kota Sorong Tahun 2019-2022

Tahun	Nilai	Kondisi Minimal	Kondisi Maksimal	Indeks
2019	0.1722	0.0611	0.1722	1
2020	0.0934	0.0611	0.1722	0.2907
2021	0.1463	0.0611	0.1722	0.7668
2022	0.0611	0.0611	0.1722	0
Jumlah				2.0576

Sumber : Diolah Penulis, Tahun 2023

$$XE = \frac{\text{Jumlah Indeks}}{n} = \frac{2.0576}{4} = 0.5144$$

3. Indeks Share

Tabel 14.
Perhitungan Nilai Share APBD Kota Sorong Tahun 2019-2022

Tahun	PAD	Total Belanja Daerah	Nilai
2019	188.001.695.883	1.120.992.577.690	0,1677
2020	120.728.889.367	1.151.643.979.132	0,1048
2021	167.676.958.723	943.456.840.284	0,1777
2022	64.699.242.782	817.764.578.663	0,0791

Sumber : Diolah Penulis, Tahun 2023

Tabel 15.
Perhitungan Indeks Share APBD Kota Sorong Tahun 2019-2022

Tahun	Nilai – Kondisi Minimal	Kondisi Maksimal – Kondisi Minimal	Indeks
2019	0,0886	0,0986	0,8985
2020	0,0257	0,0986	0,2606
2021	0,0986	0,0986	1,0000
2022	-	0,0986	0,0000

Sumber : Diolah Penulis, Tahun 2023

Tabel 16.
Indeks Share APBD Kota Sorong Tahun 2019-2022

Tahun	Nilai	Kondisi Minimal	Kondisi Maksimal	Indeks
2019	0,1677	0,0791	0,1777	0,8985
2020	0,1048	0,0791	0,1777	0,2606
2021	0,1777	0,0791	0,1777	1,0000
2022	0,0791	0,0791	0,1777	0,0000
Total				2,1591

Sumber : Diolah Penulis, Tahun 2023

$$XS = \frac{\text{Jumlah Indeks}}{n} = \frac{2,1591}{4} = 0,5397$$

3.4 Varians Anggaran

1. Varians Pendapatan

Tabel 17.
Hasil Hitung Varians Pendapatan Pemerintah Kota Sorong Tahun 2019-2022

Tahun 2019					
Keterangan	Anggaran Pendapatan	Realisasi Pendapatan	Varian	Ketidaksesuaian(%)	Kriteria
PAD	143.789.331.800	188.001.695.883	44,212,364,083	31	F
Dana Perimbangan	942.317.867.954	960.037.536.979	17,719,669,025	2	F
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	29.983.158.974	25.273.293.902	4,709,865,072	-16	U
Total Pendapatan	1.116.090.358.728	1.173.312.526.764	57,222,168,036	5	F
Tahun 2020					
Keterangan	Anggaran Pendapatan	Realisasi Pendapatan	Varian	Ketidaksesuaian(%)	Kriteria
PAD	277,548,450,470	120,728,889,367	156,819,561,103	-57	U

Dana Perimbangan	858,820,144,488	967,507,303,637	108,687,159,149	15	F
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	155,343,479,121	20,599,900,204	134,743,578,917	-87	U
Total Pendapatan	1,291,712,074,079	1,108,836,093,209	182,875,980,870	-14	U

Tahun 2021

Keterangan	Anggaran Pendapatan	Realisasi Pendapatan	Varian	Ketidaksesuaian(%)	Kriteria
PAD	314,251,055,993	167,676,958,723	146,574,097,270	-47	U
Dana Perimbangan	855,718,455,333	792,705,390,293	63,013,065,040	-7	U
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	18,751,725,600	20,460,071,911	1,708,346,311	9	F
Total Pendapatan	1,188,721,236,926	980,842,420,928	207,878,815,998	-17	U

Tahun 2022

Keterangan	Anggaran Pendapatan	Realisasi Pendapatan	Varian	Ketidaksesuaian(%)	Kriteria
PAD	325,392,277,421	64,699,242,782	260,693,034,639	-80	U
Dana Perimbangan	950,269,255,969	971,421,029,230	970,470,759,974	2	F
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	121,986,277,421	9,239,558,290	112,746,719,131	-92	U
Total Pendapatan	1,275,661,533,390	1,036,120,272,012	239,541,261,378	-19	U

Sumber : Diolah Penulis, Tahun 2023

$$\text{Varians Pendapatan} = \frac{4,299,111,312,913}{4,872,185,203,173} \times 100\% = 88.20\%$$

Berdasarkan perhitungan data di atas, varians pendapatan pemerintah daerah Kota Sorong berada di posisi *Unfavourable* (tidak disukai). Hal ini dapat dilihat dari realisasi pendapatan daerah yang tidak sesuai dengan jumlah yang dianggarkan atau dengan kata lain tidak mencapai target yang dituju. Varians realisasi pendapatan pemerintah Kota Sorong tahun 2019-2022 rata-rata mencapai 88,20% dari total 100% yang diharapkan. Mahmudi menyatakan “pemerintah memiliki kinerja pendapatan yang baik apabila mampu memperoleh pendapatan yang melebihi jumlah yang dianggarkan, sebaliknya apabila realisasi pendapatan di bawah jumlah yang dianggarkan, maka hal itu dinilai kurang baik”. Berdasarkan konsep tersebut, pemerintah Kota Sorong dinilai masih memiliki kinerja pendapatan yang kurang baik.

2. Varians Belanja

Tabel 18.
Hasil Hitung Varians Belanja Kota Sorong Tahun 2019-2022

Tahun 2019

Keterangan	Anggaran Belanja	Realisasi Belanja	Varian	Ketidaksesuaian(%)	Kriteria
Belanja Langsung	417,545,554,521	387,230,387,481	30,315,167,040	7.26	F
Belanja Tidak Langsung	1,091,733,701,855	1,082,173,790,560	9,559,911,295	0.87	F
Total Belanja	1,509,279,256,376	1,469,404,178,041	39,875,078,335	3	F

Tahun 2020

Keterangan	Anggaran Belanja	Realisasi Belanja	Varian	Ketidaksesuaian(%)	Kriteria
Belanja Langsung	452,905,148,761	399,624,590,266	53,280,558,495	11.76	F
Belanja Tidak Langsung	1,292,236,968,168	1,096,779,981,651	195,456,986,517	15.12	F
Total Belanja	1,745,142,116,929	1,496,404,571,917	248,737,545,012	14	F

Tahun 2021

Keterangan	Anggaran Belanja	Realisasi Belanja	Varian	Ketidaksesuaian(%)	Kriteria
Belanja Langsung	451,173,665,826	382,049,721,768	69,123,944,058	15.32	F
Belanja Tidak Langsung	1,145,981,106,326	895,910,872,060	250,070,234,266	21.82	F
Total Belanja	1,597,154,772,152	1,277,960,593,828	319,194,178,324	20	F

Tahun 2022

Keterangan	Anggaran Belanja	Realisasi Belanja	Varian	Ketidaksesuaian(%)	Kriteria
Belanja Langsung	473,994,613,082	347,258,662,973	126,735,950,109	26.73	F
Belanja Tidak Langsung	1,057,792,513,475	768,515,523,714	289,276,989,761	27.34	F
Total Belanja	1,531,787,126,557	1,115,774,186,687	416,012,939,870	27	F

Sumber : Diolah Penulis, Tahun 2023

$$\text{Varians Belanja} = \frac{5,359,543,530,473}{6,383,363,272,014} \times 100\% = 83,96\%$$

Berdasarkan perhitungan varians Belanja di atas, varians belanja pemerintah Kota Sorong dikategorikan *favourable* (disukai). Hal ini dapat dilihat dari jumlah realisasi belanja tahun 2019-2022 yang tidak melebihi anggaran belanja yang direncanakan. Varians realisasi belanja pemerintah Kota Sorong tahun 2019-2022 rata-rata mencapai 83,96% dari total 100% yang dianggarkan. Mahmudi menyatakan “dalam melakukan analisis varians anggaran hendaknya tidak terpaku pada persentase penghematan yang berhasil dilakukan, tetapi juga pada nominalnya, meskipun secara persentase kecil, tetapi jika secara nominal cukup signifikan, maka dapat dikatakan kinerjanya baik”. Berdasarkan konsep tersebut, kinerja belanja pemerintah Kota Sorong masih dikategorikan cukup baik dikarenakan pemerintah Kota Sorong berhasil menekan jumlah realisasi belanja sehingga tidak melebihi dari jumlah yang dianggarkan.

3.5 Hambatan yang dialami Pemerintah Daerah

hambatan yang dialami Dinas Pendapatan Daerah adalah sebagai berikut :

1. Target PAD yang tidak sesuai dengan Potensi PAD

Penentuan target Pendapatan Asli Daerah tidak sesuai dengan potensi Pendapatan Asli Daerah yang ada, berdasarkan data yang peneliti peroleh, dalam empat tahun terakhir, realisasi Pendapatan Asli Daerah cenderung hanya mencapai setengah dari yang ditargetkan. Kurangnya koordinasi dengan *stakeholder* terkait menjadi salah satu penyebab dari permasalahan ini, Pengkajian terhadap target pendapatan asli daerah harus dikaji secara mendalam dan lebih teliti agar tetap realistis terhadap tahun yang dianggarkan.

2. Sarana pemungutan pajak dan retribusi yang belum memadai

Sarana pemungutan pajak dan retribusi yang ada di kota sorong masih belum optimal. Sebagian besar area perbelanjaan di kota sorong belum dioptimalkan pemungutan pajak dan retribusinya. Hanya Sebagian pusat perbelanjaan yang sudah menerapkan sistem pemungutan retribusi parkir yang sesuai standar. Dengan adanya permasalahan tersebut akan menghilangkan peluang pendapatan retribusi daerah yang lebih besar.

3. Kesadaran membayar pajak dan retribusi yang masih rendah.

Sebagian masyarakat kota sorong masih memiliki kesadaran yang rendah akan kewajibannya membayar pajak. Hal ini juga berlaku untuk pembayaran retribusi, seringkali masyarakat kota sorong menghindari membayar retribusi jasa umum seperti retribusi parkir, retribusi pelayanan pasar dan retribusi kebersihan dan persampahan.

3.6 Upaya Yang Dilakukan Pemerintah Daerah

Beberapa upaya tersebut sebagai berikut :

1. Membenahi peraturan daerah tentang pendapatan asli daerah

Dispenda kota sorong telah menjalin komunikasi dengan Lembaga terkait target pendapatan asli daerah yang diinginkan, target PAD tersebut harus realistis dan sesuai dengan potensi pendapatan asli daerah. Pengkajian telah dilakukan terhadap potensi pendapatan daerah pada tahun yang akan datang.

2. Peningkatan sarana pemungutan pajak dan retribusi

Pemerintah daerah telah meningkatkan sarana prasarana pemungutan retribusi di beberapa tempat di kota sorong, sebagai contoh, Pemerintah daerah telah menempatkan mesin karcis parkir di beberapa pusat perbelanjaan termasuk daerah-daerah pusat keramaian masyarakat telah dilakukan pemungutan retribusi daerah. Hal tersebut sebagai bentuk peningkatan sarana dan prasarana pemungutan PAD.

3. Pendataan wajib pajak dan retribusi

Pemerintah telah melakukan pendataan wajib pajak dan retribusi terhadap masyarakat yang seharusnya membayar pajak. Hal ini juga sebagai salah satu wujud pengukuran terhadap potensi pendapatan daerah. Pemerintah daerah juga telah melakukan pemutihan terhadap beberapa subjek pajak tertentu.

3.7 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Kinerja keuangan pemerintah daerah masih kurang efektif dan kemampuan keuangan pemerintah daerah Kota Sorong masih tergolong rendah karena masih mengandalkan dana dari pemerintah pusat. Penulis menemukan temuan penting mengenai hambatan yang dialami pemerintah dalam mengelolai keuangannya yaitu terdapat rencana target pendapatan daerah yang tidak sesuai dengan potensi pendapatan daerah yang ada. Hal ini menimbulkan permasalahan untuk tahun anggaran yang akan dilaksanakan dikarenakan Dispenda tidak akan mampu untuk memenuhi target tersebut, sehingga diperlukan pengkajian ulang yang lebih mendalam terhadap target pendapatan daerah tersebut.

IV. KESIMPULAN

Kinerja keuangan pemerintah daerah Kota Sorong masih dianggap kurang baik dan tidak efektif. Bisa dilihat dari hasil perhitungan dan indikator yang telah digunakan, Rasio Kemandirian dan Rasio Derajat Desentralisasi masih berada di kategori Kurang, Rasio Aktivitas pada tahun 2019 sempat berada di kategori Sangat Efektif namun memasuki tahun 2020-2022 selalu berada pada kategori Tidak Efektif. Untuk Rasio Aktivitas Belanja, pemerintah daerah masih lebih banyak mengalokasikan dana kepada belanja aparatur daripada belanja modal, sedangkan untuk Rasio Keserasian Belanja, pemerintah daerah lebih mengutamakan Belanja Langsung daripada Belanja Tidak Langsung, hal ini dapat terlihat dari perbedaan rata-rata rasio realisasi belanja. Kemampuan Keuangan Kota Sorong masih dapat dikategorikan Tinggi. Namun, tingginya angka tersebut lebih didominasi oleh jumlah pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat. Berdasarkan analisis varians anggaran, pendapatan Kota Sorong rata-rata berada di golongan *Unfavorable* (tidak disukai), hal ini dikarenakan realisasi pendapatan Kota Sorong yang tidak mencapai target yang dituju. Selain itu, pada varians Belanja mayoritas berada pada kategori *favorable* (disukai). Secara finansial, pemerintah daerah kota sorong belum siap untuk menjalankan otonomi daerah secara penuh. Hal tersebut disebabkan karena pemerintah daerah kota sorong masih bergantung dengan dana dari pemerintah pusat.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan Biaya Penelitian. Selain itu, Informan Wawancara yang tak dapat memberikan keterangannya juga menjadi kendala dalam penelitian ini.

Arah Masa Depan Penelitian. Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian. Oleh karena itu, penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan yang lebih mendalam pada lokasi serupa dan informan yang lebih memadai.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Sekretaris BPKAD dan jajarannya serta Sekretaris Dispenda yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, kemudian kepada seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Ahmad, N. and Ali, S. (2010) 'Corruption and financial sector performance: A cross-country analysis', *Economics Bulletin*, 30(1), pp. 303–308.

Bisma and Susanto (2010) 'Evaluasi Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi Nusa

Tenggara Barat Tahun Anggaran 2003 – 2007’, *Ganec Swara*, 4(3), pp. 75–86.

Harahap, H. F. (2020) ‘Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah’, *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 4(1), p. 34. doi: 10.33087/ekonomis.v4i1.87.

Mahmudi (2019) *ANALISIS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH*. Keempat. Yogyakarta: STIM YKPM.

Mutiha, A. H. (2017) ‘Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bogor Tahun Anggaran 2010 -2014’, *Jurnal Vokasi Indonesia*, 4(2). doi: 10.7454/jvi.v4i2.63.

Robbins, G., Turley, G. and McNena, S. (2016) ‘Benchmarking the financial performance of local councils in Ireland’, *Administration*, 64(1), pp. 1–27. doi: 10.1515/admin-2016-0009.

Rusman, L., Amir, A. M. and Fattah, V. Y. (2018) ‘Analisis Kemampuan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Palu dalam Membiayai Pengeluarannya’, *Jurnal Katalogis*, 6(4), pp. 37–47.

Soares, A., Nurpratiwi, R. and Makmur, M. (2015) ‘Peranan Pemerintah Daerah Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah’, *Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 4.

Ahmad, N. and Ali, S. (2010) ‘Corruption and financial sector performance: A cross-country analysis’, *Economics Bulletin*, 30(1), pp. 303–308.

Bisma and Susanto (2010) ‘Evaluasi Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2003 – 2007’, *Ganec Swara*, 4(3), pp. 75–86.

Harahap, H. F. (2020) ‘Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah’, *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 4(1), p. 34. doi: 10.33087/ekonomis.v4i1.87.

Mahmudi (2019) *ANALISIS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH*. Keempat. Yogyakarta: STIM YKPM.

Mutiha, A. H. (2017) ‘Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bogor Tahun Anggaran 2010 -2014’, *Jurnal Vokasi Indonesia*, 4(2). doi: 10.7454/jvi.v4i2.63.

Robbins, G., Turley, G. and McNena, S. (2016) ‘Benchmarking the financial performance of local councils in Ireland’, *Administration*, 64(1), pp. 1–27. doi: 10.1515/admin-2016-0009.

Rusman, L., Amir, A. M. and Fattah, V. Y. (2018) ‘Analisis Kemampuan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Palu dalam Membiayai Pengeluarannya’, *Jurnal Katalogis*, 6(4), pp. 37–47.

Soares, A., Nurpratiwi, R. and Makmur, M. (2015) ‘Peranan Pemerintah Daerah Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah’, *Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 4.